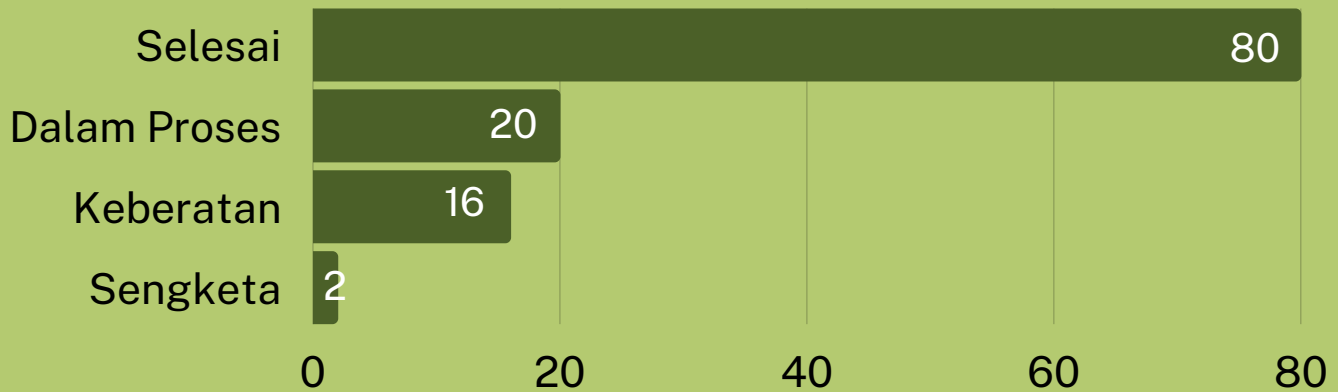




# STATISTIK PPID KLHK DALAM ANGKA

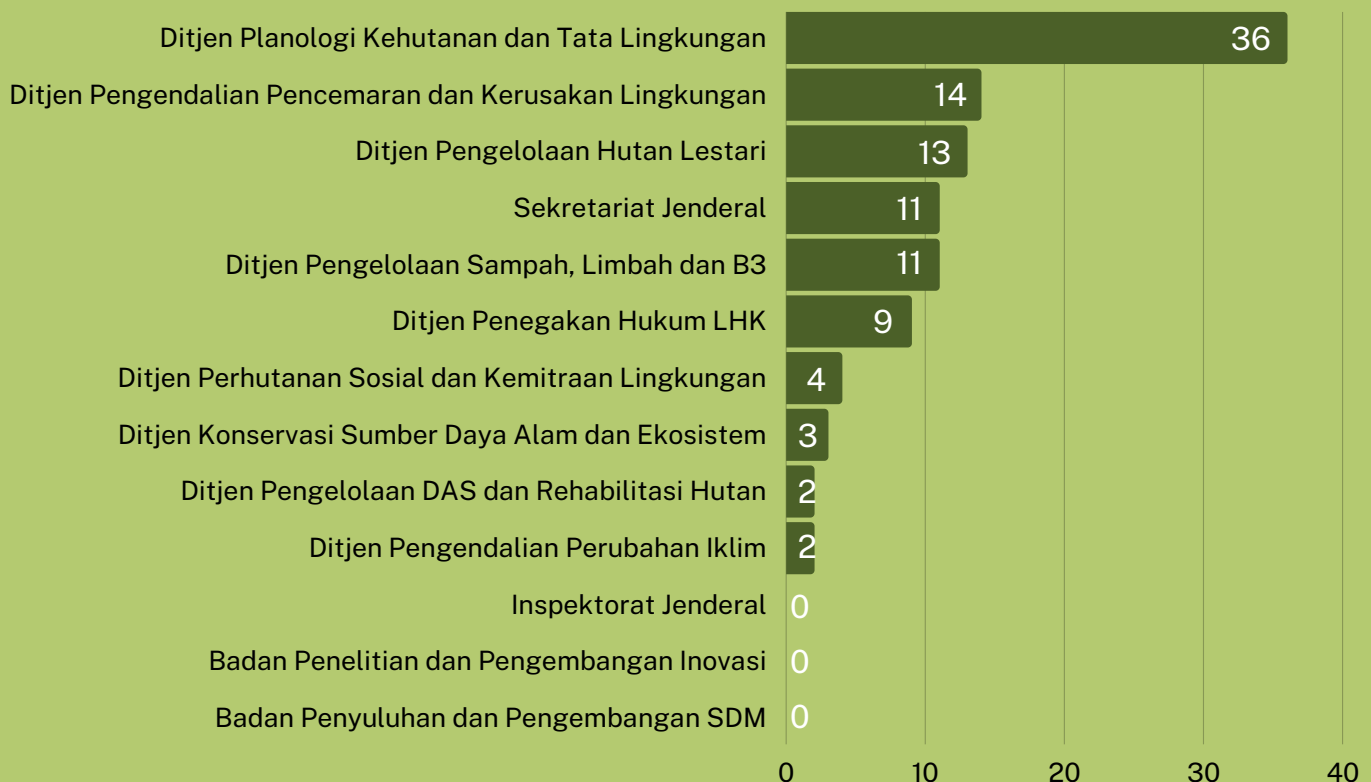
Permohonan informasi yang diajukan oleh publik kepada PPID Utama KLHK melalui surat, email maupun tatap muka selama tahun 2020 sebanyak 100 permohonan informasi.

# PERMOHONAN INFORMASI



Dari sejumlah permohonan informasi publik di tahun 2020 dapat diketahui Satuan Kerja Eselon I yang paling banyak dimohon. Biro Hubungan Masyarakat selaku PPID Utama KLHK menjadi pintu bagi pelayanan informasi publik.

# PERMOHONAN INFORMASI BERDASARKAN SATUAN KERJA/UNIT ESELON I



# PERMOHONAN INFORMASI BERDASARKAN ISU

## **PKTL**

Dokumen Amdal,  
UKL-UPL, SK Pelepasan  
Kawasan Hutan

## **PPKL**

Restorasi ekosistem gambut

## **PHPL**

Ijin usaha,  
data produksi kayu

## **PHLHK/Gakkum**

Daftar perusahaan yang  
mendapatkan sanksi  
administrasi terkait kasus  
karhutla

## **PSLB3**

Izin lingkungan dan izin  
PPLH, laporan pengelolaan  
limbah B3

## **Biro Hukum**

Salinan draft PermenLHK

## **PSKL**

Peta indikatif dan areal  
perhutanan sosial (PIAPS)

## **KSDAE**

Tata batas kawasan taman  
wisata alam (TWA)

## **PPI/PHLHK**

Luas areal terbakar

## **Biro KLN**

MoU Indonesia bilateral  
(Denmark, Korea)

## **Biro Keuangan**

Laporan Keuangan (*audited*)

# WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN INFORMASI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU KIP yakni Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Untuk itu, PPID Utama KLHK berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memberikan jawaban atau tanggapan atas permohonan informasi yang diajukan publik dengan tepat waktu.

<b>01</b> JANUARI	Selesai Tepat Waktu	2	<b>02</b> FEBRUARI	Selesai Tepat Waktu	6
	Selesai Tidak Tepat Waktu	2		Selesai Tidak Tepat Waktu	5
	Proses	-		Proses	-
	Jumlah	4		Jumlah	11

---

<b>03</b> MARET	Selesai Tepat Waktu	2	<b>04</b> APRIL	Selesai Tepat Waktu	-
	Selesai Tidak Tepat Waktu	3		Selesai Tidak Tepat Waktu	4
	Proses	1		Proses	-
	Jumlah	6		Jumlah	4

---

<b>05</b> MEI	Selesai Tepat Waktu	8	<b>06</b> JUNI	Selesai Tepat Waktu	11
	Selesai Tidak Tepat Waktu	1		Selesai Tidak Tepat Waktu	1
	Proses	-		Proses	-
	Jumlah	9		Jumlah	12

---

<b>07</b> JULI	Selesai Tepat Waktu	5	<b>08</b> AGUSTUS	Selesai Tepat Waktu	1
	Selesai Tidak Tepat Waktu	5		Selesai Tidak Tepat Waktu	2
	Proses	1		Proses	1
	Jumlah	11		Jumlah	4

---

<b>09</b> SEPTEMBER	Selesai Tepat Waktu	9	<b>10</b> OKTOBER	Selesai Tepat Waktu	1
	Selesai Tidak Tepat Waktu	4		Selesai Tidak Tepat Waktu	2
	Proses	3		Proses	4
	Jumlah	16		Jumlah	7

---

<b>11</b> NOVEMBER	Selesai Tepat Waktu	3	<b>12</b> DESEMBER	Selesai Tepat Waktu	-
	Selesai Tidak Tepat Waktu	3		Selesai Tidak Tepat Waktu	-
	Proses	5		Proses	5
	Jumlah	11		Jumlah	5

<b>TOTAL</b>	Selesai Tepat Waktu	48
	Selesai Tidak Tepat Waktu	32
	Proses	20
	Jumlah	100



Sedangkan terhadap 100 permohonan informasi yang diajukan publik kepada PPID Utama KLHK jumlah yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya maupun ditolak berikut alasannya adalah sebagai berikut:

**01**  
**JANUARI**

Dikabulkan  
• Seluruhnya **4**  
• Sebagian -  
Ditolak -  
Alasan Penolakan -

**02**  
**FEBRUARI**

Dikabulkan  
• Seluruhnya **10**  
• Sebagian -  
Ditolak **1**  
Alasan Penolakan **Informasi dalam proses**

**03**  
**MARET**

Dikabulkan  
• Seluruhnya **4**  
• Sebagian **1**  
Ditolak **1**  
Alasan Penolakan **Tidak melengkapi persyaratan permohonan informasi**

**04**  
**APRIL**

Dikabulkan  
• Seluruhnya **3**  
• Sebagian -  
Ditolak **1**  
Alasan Penolakan **Informasi dalam proses**

**05**  
**MEI**

Dikabulkan  
• Seluruhnya **9**  
• Sebagian -  
Ditolak -  
Alasan Penolakan -

**06**  
**JUNI**

Dikabulkan  
• Seluruhnya **11**  
• Sebagian -  
Ditolak **1**  
Alasan Penolakan **Informasi dalam proses**

# 07

JULI

Dikabulkan

- Seluruhnya 9
- Sebagian 1

Ditolak 1

Alasan Penolakan Tidak melengkapi persyaratan permohonan informasi

---

# 08

AGUSTUS

Dikabulkan

- Seluruhnya 2
- Sebagian 1

Ditolak 1

Alasan Penolakan Bukan kewenangan KLHK

---

# 09

SEPTEMBER

Dikabulkan

- Seluruhnya 11
- Sebagian 3

Ditolak 2

Alasan Penolakan Informasi dalam proses

---

# 10

OKTOBER

Dikabulkan

- Seluruhnya 2
- Sebagian 4

Ditolak 1

Alasan Penolakan Informasi dalam proses

---

# 11

NOVEMBER

Dikabulkan

- Seluruhnya 5
- Sebagian 5

Ditolak 1

Alasan Penolakan Informasi dalam proses

---

# 12

DESEMBER

Dikabulkan

- Seluruhnya -
- Sebagian 5

Ditolak -

Alasan Penolakan -

---

# TOTAL

Dikabulkan

- Seluruhnya 70
- Sebagian 20

Ditolak 10

Sejumlah permohonan informasi yang **dikabulkan sebagian** dengan alasan seperti:

- Dokumen yang dimohonkan **tidak dalam penguasaan KLHK melainkan dikeluarkan oleh Badan Publik lain**. Untuk itu Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID di Pemerintah Daerah (contoh: dokumen Amdal daerah, data pencemaran udara daerah)
- Dokumen yang dimohonkan **masih dalam proses/tahapan pembahasan dan belum final**, sehingga sesuai P.18/2018 dokumen belum dapat diberikan (contoh: sejumlah dokumen UUCK maupun program pemerintah food estate yang belum final)
- Dokumen belum dapat diberikan karena **informasi yang dimohonkan masih berproses di persidangan** (contoh: kasus penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan)

# KEBERATAN TERHADAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Walaupun pemberian informasi maupun tanggapan PPID Utama KLHK kepada Pemohon Informasi selalu diupayakan secara optimal namun potensi pengajuan keberatan bahkan sampai penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi tetap ada. Tergambar pada grafik dibawah ini bahwa dari 100 permohonan informasi yang diajukan kepada PPID Utama KLHK ada 16 register keberatan dan 2 sengketa informasi publik.

## 01

JANUARI

---

## 02

FEBRUARI

**Pemohon:**

Kiki Taufik

**Pokok Keberatan:**

- Daftar seluruh Perusahaan yang disegel dan di proses oleh KLHK terkait kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2019
- Daftar saksi Administrasi yang ditetapkan oleh KLHK untuk seluruh Perusahaan yang disegel dan di proses akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2019 beserta penjelasannya lengkap dan dasar penetapan sanksi administrasi tersebut.
- Keterangan terkait Nama Perusahaan, Jenis Kegiatan, Tipe Perseroan, Lokasi dan Status seluruh Perusahaan yang disegel dan diproses oleh KLHK akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2019.

**Status Keberatan atas Tanggapan:**

Sudah diberikan tanggapan keberatan & informasi tidak diberikan karena masih dalam proses

---



# 03

MARET

---

# 04

APRIL

**Pemohon:**

Dina Kartikasari

**Pokok Keberatan:**

- Permohonan informasi laporan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dari September 2018 hingga Januari 2020

**Status Keberatan atas Tanggapan:**

Sudah diberikan tanggapan keberatan & informasi tidak diberikan karena masih dalam proses

**Pemohon:**

Kiki Taufik

**Pokok Keberatan:**

- Permohonan informasi berupa daftar perusahaan yang mendapatkan teguran tertulis, pidana (p-21) dan proses pidana terkait dengan kebakaran hutan dan lahan tahun 2015-2018

**Status Keberatan atas Tanggapan:**

Sudah diberikan tanggapan keberatan & diberikan informasinya

---

# 05

MEI

---

# 06

JUNI

**Pemohon:**

Kiki Taufik

**Pokok Keberatan:**

- Daftar seluruh perusahaan di Indonesia yang mendapatkan sanksi administrasi (teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin) dari Kementerian LHK terkait kasus kebakaran hutan dan lahan pada periode tahun 2019, belum dapat diberikan karena masih dalam proses penegakan hukum

**Status Keberatan atas Tanggapan:**

Sudah diberikan tanggapan keberatan & diberikan informasinya

07  
JULI

**Pemohon:**

Indranas Gaho

**Pokok Keberatan:**

- Dokumen yang berkaitan dengan PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTTI)
- Dokumen berkaitan dengan PT. Teluk Nauli

**Status Keberatan atas Tanggapan:**

Sudah diberikan tanggapan keberatan & diberikan informasinya.

---

08  
AGUSTUS

**Pemohon:**

Achmad Saleh Suhada

**Pokok Keberatan:**

- Salinan Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan untuk Fasilitas Pekan Olahraga Nasional (PON) di Mimika
- Salinan Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan PT. Prima Sarana Graha di Mimika.

**Status Keberatan atas Tanggapan:**

Sudah diberikan tanggapan keberatan & informasi tidak diberikan karena bukan kewenangan KLHK merupakan kewenangan KPA Provinsi Aceh dan KPA Kabupaten Aceh Barat.

**Pemohon:**

Achmad Saleh Suhada

**Pokok Keberatan:**

- Informasi dan data berupa 50 perusahaan yang di Gugat Melalui Gugatan Perdata terkait kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia tahun 2015 samapai juni 2020

**Status Keberatan atas Tanggapan:**

Sudah diberikan tanggapan keberatan & diberikan informasinya.

---

09  
SEPTEMBER

**Pemohon:**

Kiki Taufik

**Pokok Keberatan:**

- Nama dan informasi lainnya seluruh perusahaan (127 Perusahaan Perkebunan dan 68 Perusahaan Hutan Tanaman Industri) yang areal konsesinya masuk dalam areal realisasi pelaksanaan restorasi gambut (lahan gambut yang sudah direstorasi/dibasahi) di Indonesia periode 2015-2019 beserta luasan masing-masing areal konsesi tersebut.

- Peta Rewetting Areal Pelaksanaan Restorasi Gambut di 3,484.637,72 Juta Hektar di Perkebunan, HTI dan Masyarakat.
- Penjelasan terkait dengan metode dan verifikasi data yang dilakukan untuk seluruh areal yang telah di Restorasi.

**Status Keberatan atas Tanggapan:**

Sudah diberikan tanggapan keberatan & diberikan informasinya.

**Pemohon:**

Fatia Maulidiyanti

**Pokok Keberatan:**

- Salinan draft Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Perlindungan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan atau peraturan pelaksana Pasal 66 UU 32/2009.
- Salinan Naskah Akademik Peraturan Menteri atau salinan hasil kajian Kementerian Lingkungan dan Kehutanan terkait kondisi pengaturan tentang perlindungan pembela HAM atas lingkungan.
- Penjelasan mengenai status dan perkembangan perumusan dan pengesahan Peraturan Mneteri Lingkungan Hidup tentang pelaksanaan Pasal 66 UU 32/2009.

**Status Keberatan atas Tanggapan:**

Sudah diberikan tanggapan keberatan & diberikan informasinya.

**Pemohon:**

Safaruddin, SH.

**Pokok Keberatan:**

- Salinan Daftar Perusahaan pemegang izin pengelolaan limbah B3 di provinsi Aceh

**Status Keberatan atas Tanggapan:**

Sudah diberikan tanggapan keberatan & diberikan informasinya.

**Pemohon:**

Salsabila Khairunisa

**Pokok Keberatan:**

- Berita Acara setiap tahapan dalam proses pengukuhan kawasan hutan produksi di lahan kinipa, lamandau, kalimantan tengah sebagaimana tercantum dalam UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 15 jo Permenhut No. P.62/MENHUT-II/2013

**Status Keberatan atas Tanggapan:**

Sudah diberikan tanggapan keberatan & informasi tidak dapat diberikan karena masih dalam proses.

**Pemohon:**

Salsabila Khairunisa

**Pokok Keberatan:**

- Berita Acara tata batas kawasan taman wisata alam (TWA) Kamojang setelah dikeluarkannya SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018
- Peta lampiran Batas sementara Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Kamojang
- Peta Blok pengelolaan kawasan cagar alam (CA) Kamojang

**Status Keberatan atas Tanggapan:**

Masih dalam proses

**10**  
OKTOBER

**Pemohon:**

Manambus Pasaribu, SH., MH.

**Pokok Keberatan:**

- Proses, tahapan, dan batasan waktu (e ne) hingga Addendum ANDAL RKL-RPL Tipe A dinyatakan disetujui atau ditolak
- Investigasi Geoteknik untuk Fasilitas Penyimpanan Taling Kajian Hidrologi (2011)
- Investigasi Geoteknik untuk Fasilitas Penyimpanan Taling (Golder Associates 2011) Sertakan semua lampiran dan tambahan ke laporan seperti log yang membosankan dan has u lapangan Addendum ANDAL haf 2-52
- Studi yang telah dilakukan terkait dengan rencana TSF di Bondar Begu antara lain:
  - a. Investigasi geoteknik untuk TSF
  - b. Laporan desain the TSF
  - c. Addendum ANDAL hal 2-57
- Pada lokasi TSF telah dilakukan pemboran geoteknik pada 28 stk bor dengan total ketinggian 872,57 m jika catatan 28 tk bor Addendum ANDAL hal 2-65 tidak termasuk di atas
- Dokumen studi kelayakan (2015) menjelaskan Konstruksi TSF dilakukan dengan menggunakan tanah hingga batuan dasar dan bahan yang digunakan untuk meninggikan tanggul Addendum ANDAL hal 4-19.

**Status Keberatan atas Tanggapan:**

Sudah diberikan tanggapan keberatan & informasi tidak dapat diberikan karena masih dalam proses.

---

**11**  
NOVEMBER

**Pemohon:**

Leonard Simanjuntak

**Pokok Keberatan:**

- Roadmap Pemasangan Pengendalian Emisi PLTU eksisting, kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Badan Publik yang melakukan supervisi dalam penyusunan dokumen

**Status Keberatan atas Tanggapan:**

Sudah diberikan tanggapan keberatan & informasi tidak dapat diberikan karena masih dalam proses.

---

**12**  
DESEMBER

**Pemohon:**

Kiki Taufik

**Pokok Keberatan:**

- Daftar seluruh perusahaan yang mengajukan pelepasan kawasan hutan dari tahun 2012-2020
- Daftar seluruh perusahaan yang mendapatkan pelepasan kawasan hutan pada tahun 2012 sampai tahun 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2012, (dilengkapi dengan penjelasan tanggal pelepasan mereka diberikan dan luas area yang diberikan pelepasan)
- Daftar seluruh perusahaan yang mendapatkan pelepasan Kawasan Hutan berdasarkan PP nomor 104 tahun 2015, mohon dilengkapi dengan penjelasan dari sektor mana atau jenis usaha dan kegiatannya, waktu pengajuan permohonan, serta fungsi kawasan hutan dan luasan yang dimohonkan untuk dilepaskan.
- Daftar seluruh perusahaan yang ditolak dalam mengajukan pelepasan kawasan hutan dari tahun 2012-2020 serta sedikit penjelasan terkait penolakan tersebut.

**Status Keberatan atas Tanggapan:**

Masih dalam proses.

# PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

## 01

**Pemohon:**

Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho

**Pokok Sengketa Informasi:**

- SK Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPHK) perusahaan pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara (semua tahapan eksplorasi dan/atau operasi produksi).
- Informasi Daftar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPHK) perusahaan pertambangan di provinsi Kalimantan Utara (semua tahapan eksplorasi dan/atau operasi produksi).
- Informasi daftar piutang PNPB Kawasan Hutan perusahaan pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara.
- Informasi perusahaan pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara yang sudah melakukan reklamasi dan pasca tambang di kawasan kehutanan

**Komisi Informasi:**

Komisi Informasi Prov. Kalimantan Timur

**Poses:**

Selesai Ajudikasi dengan Putusan Gugur

## 02

**Pemohon:**

Ahmad Saini dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)

**Pokok Sengketa Informasi:**

- Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT. Dairi Prima Mineral yang berlokasi di Sopo Komil, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
- Surat Keputusan (SK) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPHK) untuk PT. Dairi Prima Mineral yang berlokasi di Sopo Komil, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara

**Komisi Informasi:**

Komisi Informasi Pusat

**Poses:**

Selesai Ajudikasi dengan Penetapan Pencabutan